

MAKALAH



MEMUTUS LINGKARAN SETAN KORUPSI

Oleh:
Ade Irawan
Indonesia Corruption Watch



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

Memutus Lingkaran Setan Korupsi

Ade Irawan

Indonesia Corruption Watch

2014

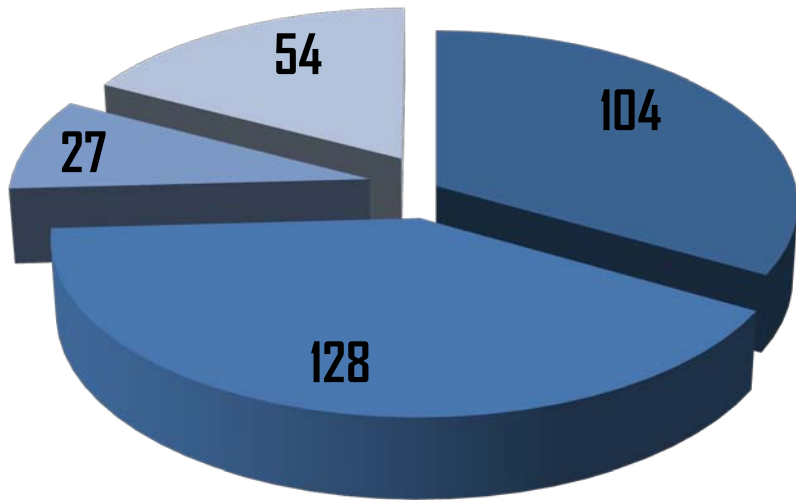
Korupsi Dalam Demokrasi

- Transisi orde baru ke orde raformasi (otoritarian – demokrasi)
- Demokrasi obat untuk melawan korupsi
- Kenyataannya, korupsi tumbuh dalam sistem demokrasi
- Kepercayaan kepada lembaga demokrasi seperti partai, parlemen, lembaga penegak hukum makin turun

Demokrasi Dibajak?

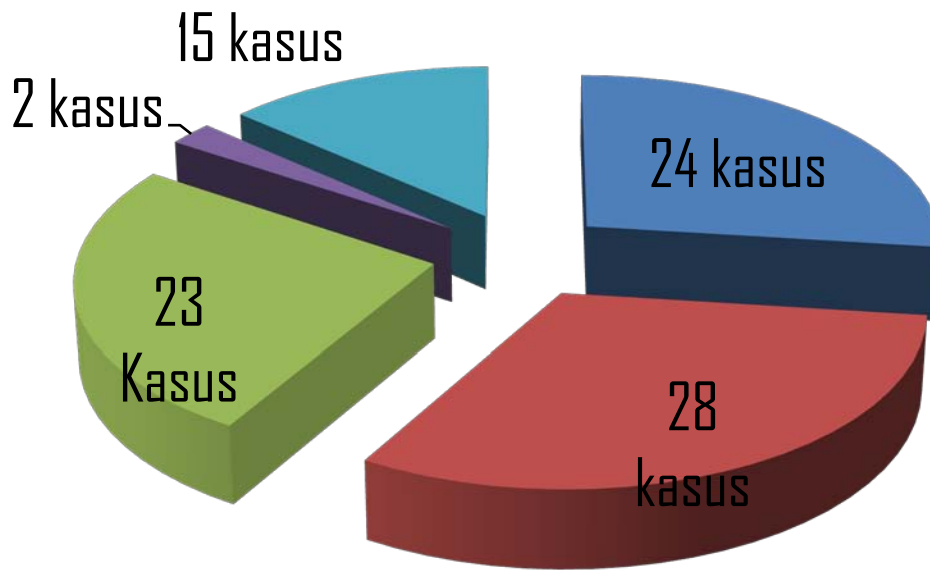
- Korupsi dalam pemilu:
 - a. Candidacy buying
 - b. Penyumbang haram
 - c. Vote Buying
 - Pemilih
 - Penyelenggara
- Korupsi Politik

Pemantauan Pemilu Legislatif 2014



Pemberian Uang	104
Pemberian Barang	128
Pemberian Jasa	27
Penggunaan Sumberdaya Negara	54

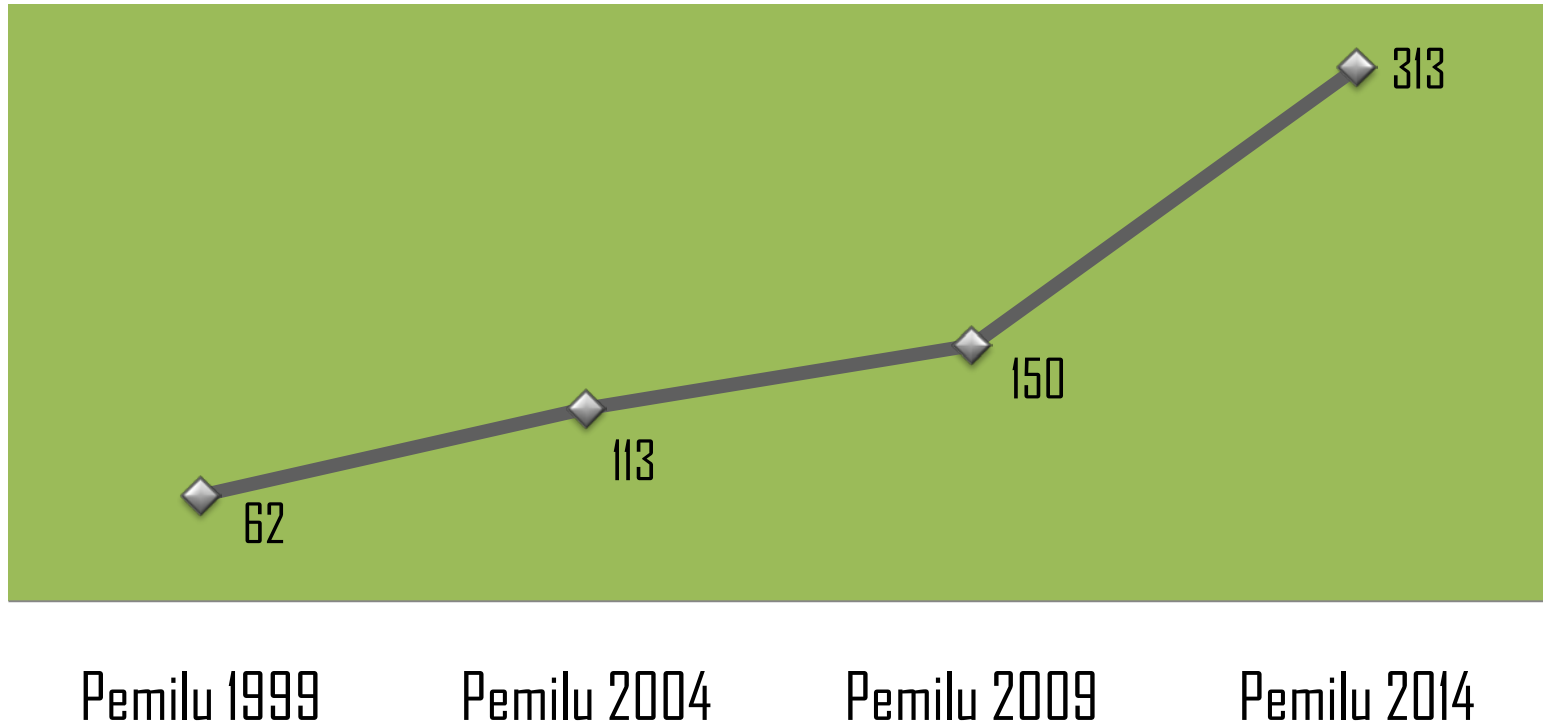
Pemberian Uang Berdasarkan Nominal



0/Tidak diketahui	15
5.000 - 25.000	24
26.000 - 50.000	28
51.000 - 100.000	23
151.000 - 200.000	2
Di atas 200.000	12

Di Daerah BANTEN banyak ditemukan pemberian dengan nominal Rp 5.000 sampai dengan Rp.25.000

Politik Uang dari Pemilu



Sumber : ICW 2014. Diolah dari data pemantauan 199,2004,2009 dan 2014

Korupsi Pemilukada

Daerah	Pemenang	Sumber Penerimaan*				
		Calon	Partai	Perseorangan	Badan hukum	Total
Kab. Pandeglang	Erwan Kurtubi dan Hj.Heriyani	500.000.000				500.000.000
Prov. Banten	Atut Chosiyah dan Rano Karno	1.000.000.000		50.000.000	7.500.000.000	8.550.000.000
Kab. Kampar	Jefry Noor dan Ibrahim Ali	892.200.000	-	-	-	892.200.000
Kota Lhokseumawe	Suadi Yahya dan Nazaruddin	219.500.000		179.950.000		401.959.07
Kota Banda Aceh	Mawardi Nurdin dan Illiza Sa'aduddin	1.308.000.000		177.000.000	413.438.600	1.898.438.600
Kota Kendari	Dr. Ir. H. Asrun dan H. Musaddar Mappasomba	50.000.000	-	-	-	50.000.000
Prov. Jakarta	Joko Widodo dan Basuki Purnama	1.342.800.000		2.618.900.000	650.000.000	4.611.700.000

Korupsi Pemilukada

No	Modus Pembajakan Penyelenggara	Penyelenggara Tidak Independen
1	Menempatkan orang-orang kandidat di KPU, Panwas, PPK, PPL, petugas TPS	Membantu kampanye kandidat
2	Suap kepada penyelenggara untuk mendukung atau tidak melaporkan kecurangan	Mengintimidasi pemilih agar memilih kandidat tertentu
3	Menjanjikan bonus kepada KPU dan Panwas	Memanipulasi DPT
4	Mengurangi anggaran KPU dan Panwas	Menandai kartu pemilihan
5	Mempersulit pencairan anggaran KPU dan Panwas	Menggunakan surat suara sisa untuk mendukung kandidat tertentu
6	Intimidasi kepada KPU, Panwas, PPK, PPL, petugas TPS	Membiarkan pelanggaran oleh kandidat tertentu
7	Menjanjikan jabatan bagi anggota KPU dan Panwas yang mendukung kandidat	Tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran dari kandidat

Korupsi Pemilukada

No	Modus	Pelaku
1	Pembagian uang secara langsung	Tim Sukses dan simpatisan
2	Pembagian asuransi khusus ojek	<p>Anggota partai, bagian dari partai, anggota dewan, dan bupati</p> <p>Calon</p> <p>Aparatur pemerintahan (Camat, Lurah, RT,RW, dan PNS)</p> <p>Lain-lain (Organisasi profesi, masyarakat umum, dan tidak jelas)</p> <p>Istri, anak dan yang mempunyai kekerabatan</p>
3	Pembagian sembako, mie, ikan.	
4	Pemberian kerudung, sajadah, helm dan berbentuk pakaian yang lain	
5	Pemberian bibit tanaman	
6	Pemberian janji door price	
7	Pemberian uang pada Kepala Desa, TPS, tempat ibadah	
8	Pengganti konsumsi dan transportasi pemilihan	
9	Pembagian sembako dan sarung	
10	Pemberian insentif bagi tokoh masyarakat, agama	
11	Mentraktir makan secara massal warga	
12	Mobilisasi massa melalui truk dan disebar ke sejumlah TPS	
13	Pengobatan gratis	
14	Uang bakso	

Korupsi di Indonesia

- Korupsi menyebar ke daerah
- Korupsi tidak hanya di sektor belanja, tapi juga pendapatan (pajak, migas, dsb)
- Korupsi umumnya dilakukan berjamaah dan diawali oleh korupsi politik
- Secara politik, korupsi mengakar dalam struktur kekuasaan dan birokrasi
- Secara sosial menjadi patologi di masyarakat
- Secara kultural, korupsi telah menjadi nilai di hampir semua lapisan

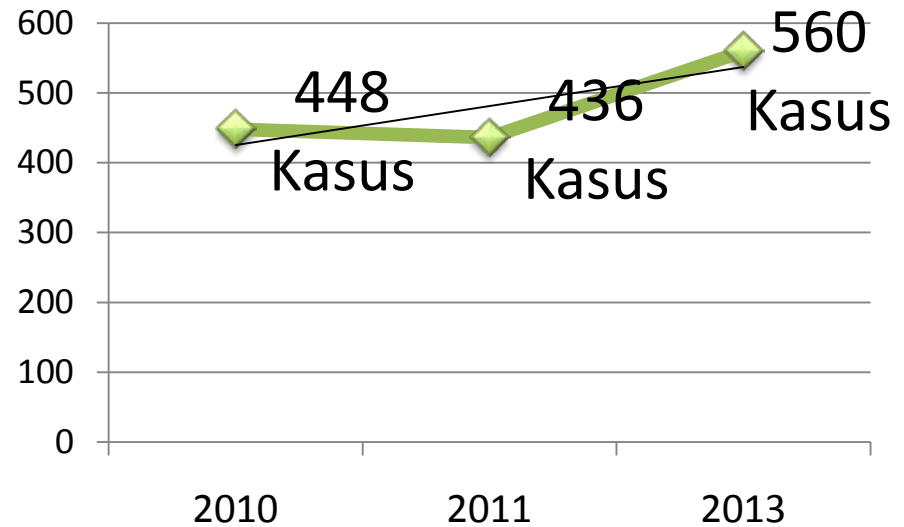
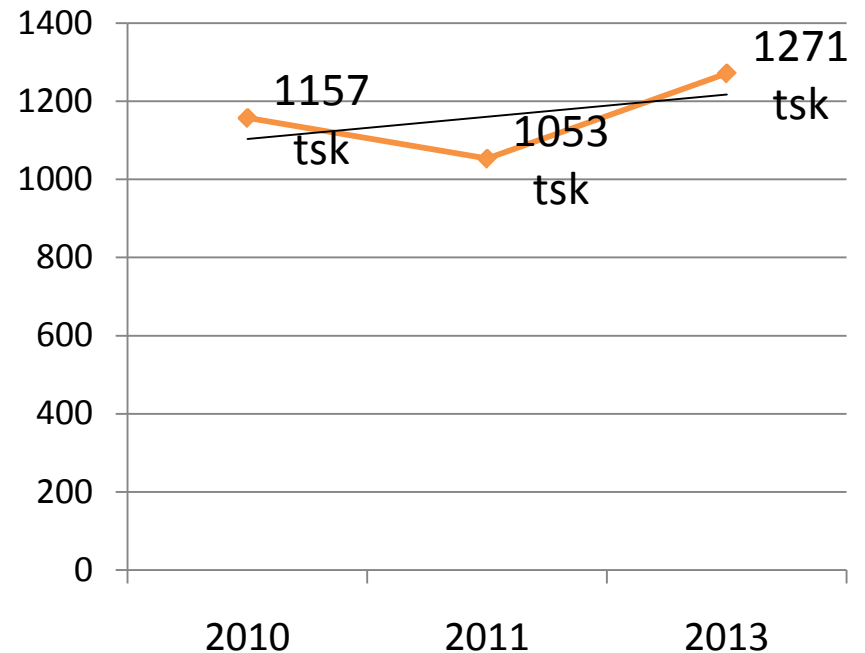
Trend Pemberantasan Korupsi Selama 3 tahun terakhir

Periode	Smt I	Smt II	Tahun	Smt I	Smt II	Smt I	Sem II
	thn	thn		thn	thn	thn	thn
	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2013
Jumlah	176	272	436	285		293	267
Kasus	kasus	kasus	kasus	kasus	-	kasus	kasus
Kerugian	2.1	1.2	2.1	1.2		5.7	1.6
Negara	triliun	triliun	triliun	triliun	-	triliun	triliun
Jumlah	441	716	1053	597		677	594
Tersangka	orang	orang	orang	orang	-	orang	orang

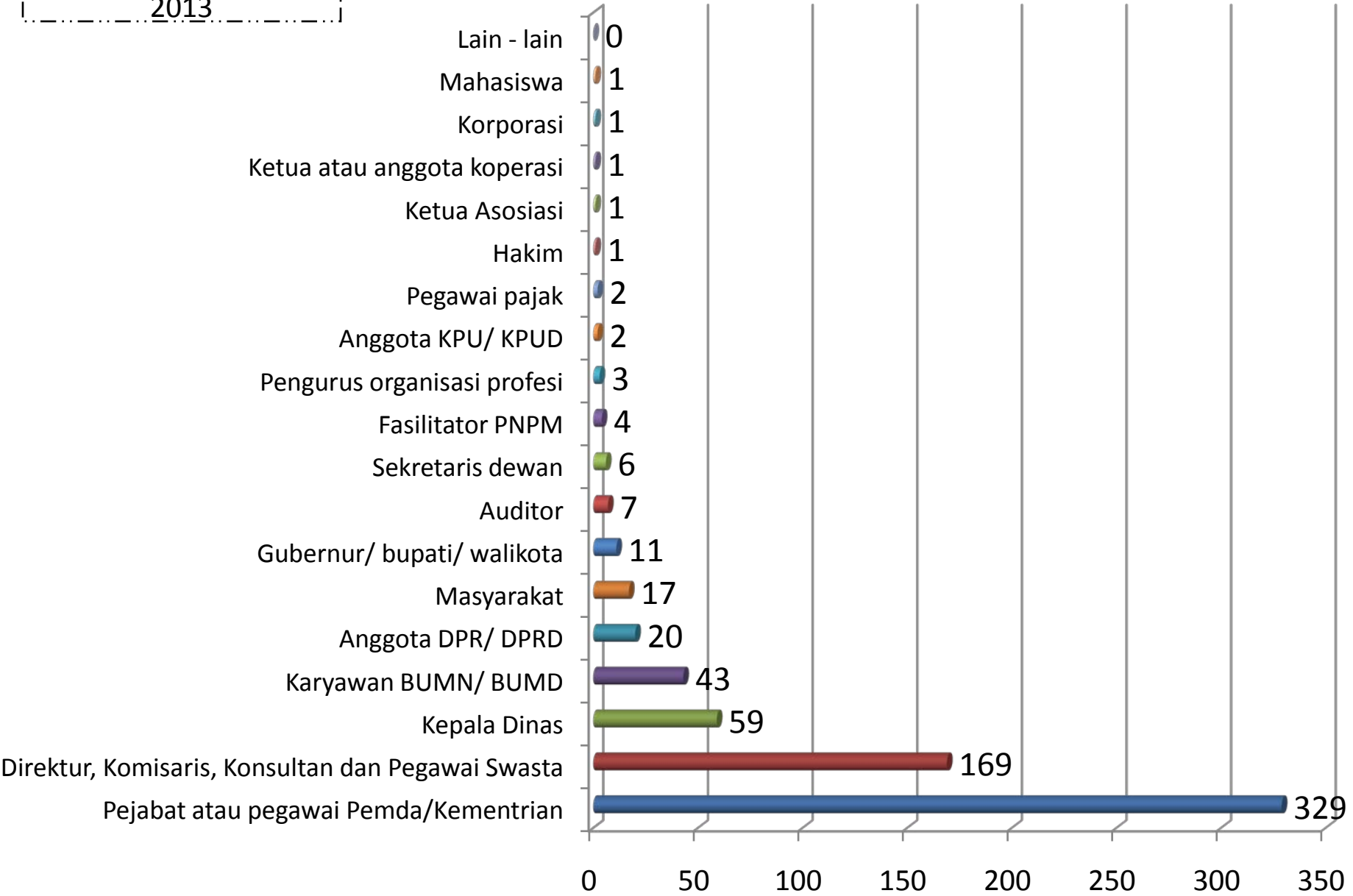
*Database korupsi Smt II thn 2012 sedang diupdate ulang

3 tahun pemberantasan korupsi

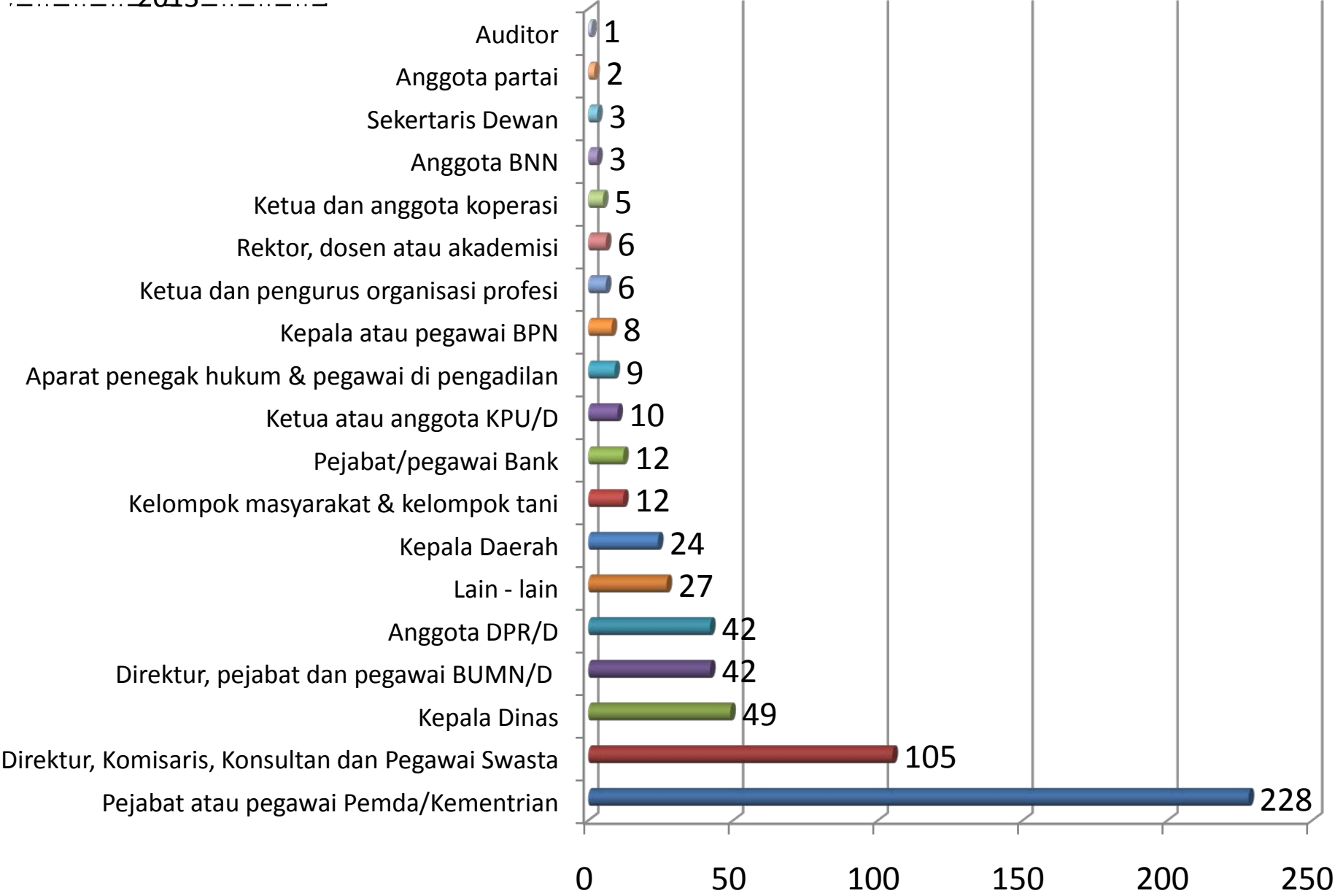
- Pemberantasan korupsi selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas.
- Peningkatan terjadi pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka.
- Kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka korupsi tahun 2013 meningkat sangat signifikan dibanding 2 tahun lalu (2,1 Triliun menjadi 7,3 Triliun).



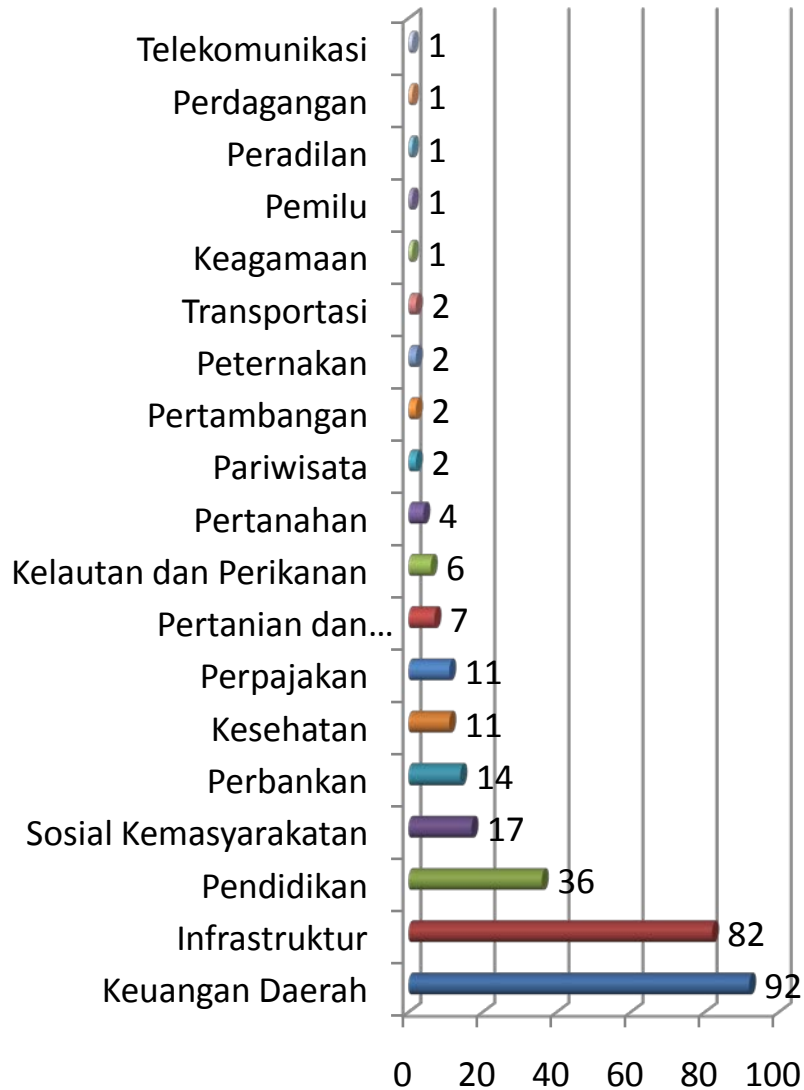
Jabatan Pelaku
Korupsi Smt 1 thn
2013



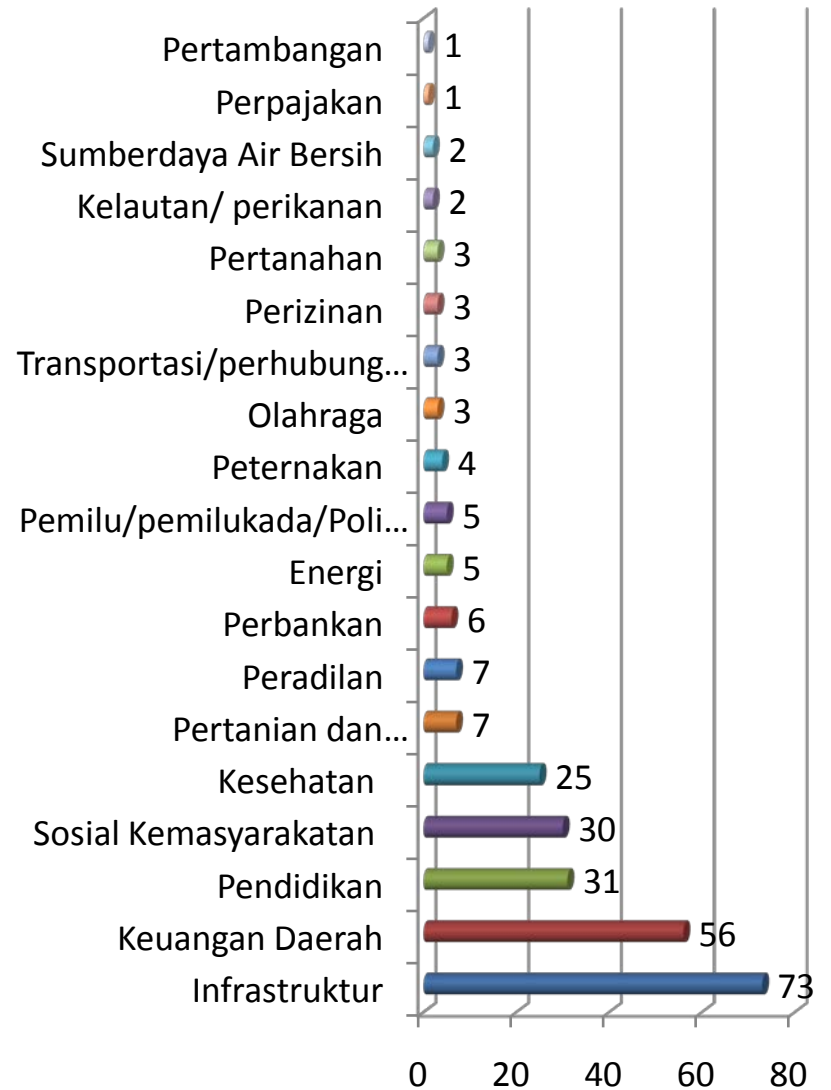
Jabatan Pelaku
Korupsi Smt 2 thn
2013



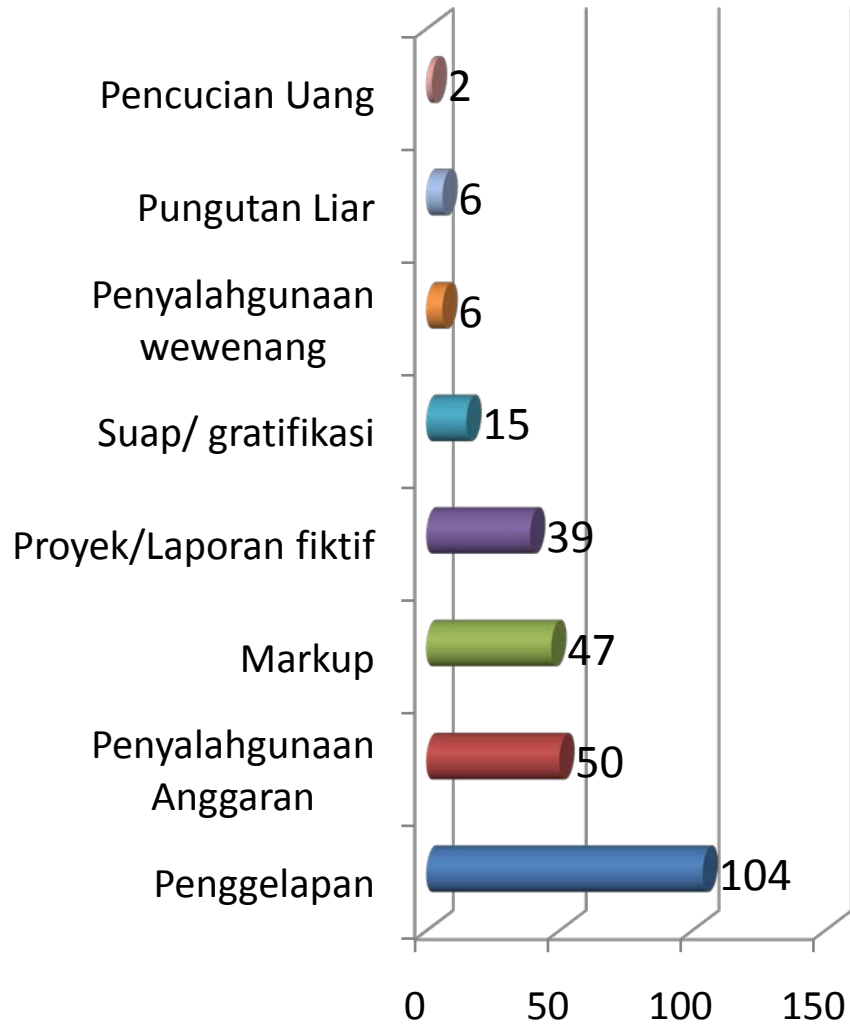
Korupsi berdasarkan sektor Smt 1 thn 2013



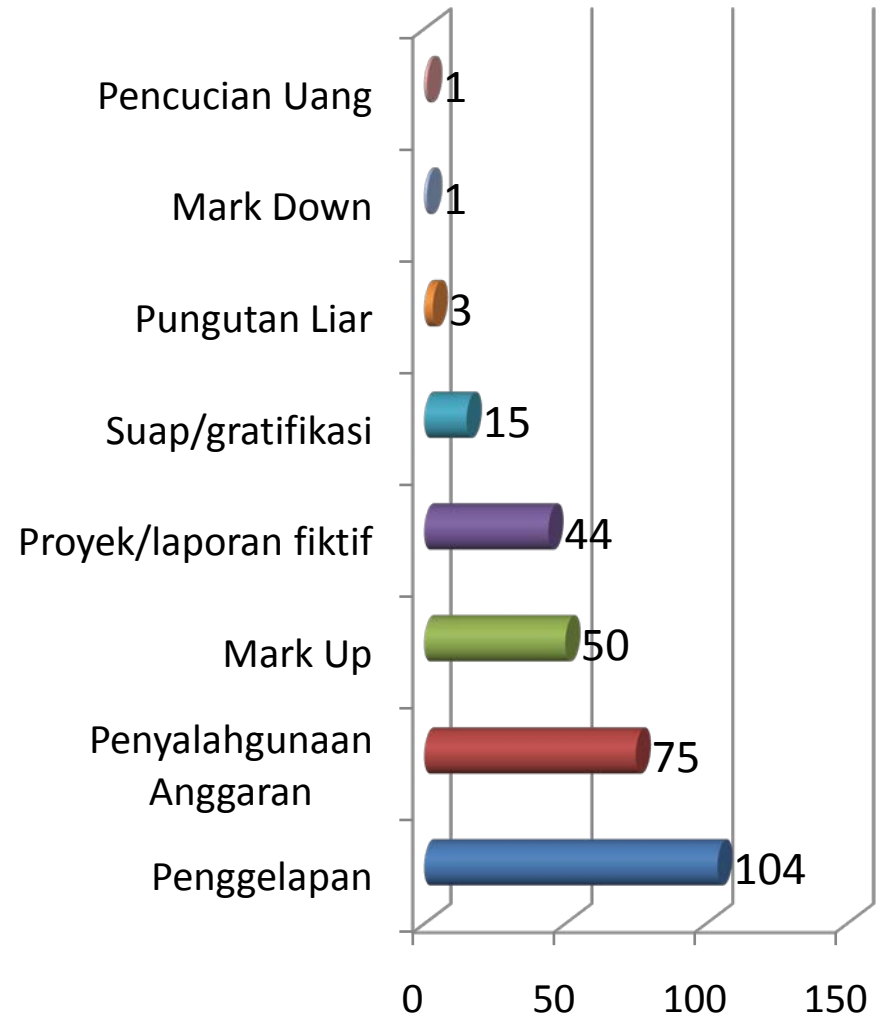
Korupsi berdasarkan sektor Smt 2 thn 2013



Modus Korupsi Smt 1
thn 2013



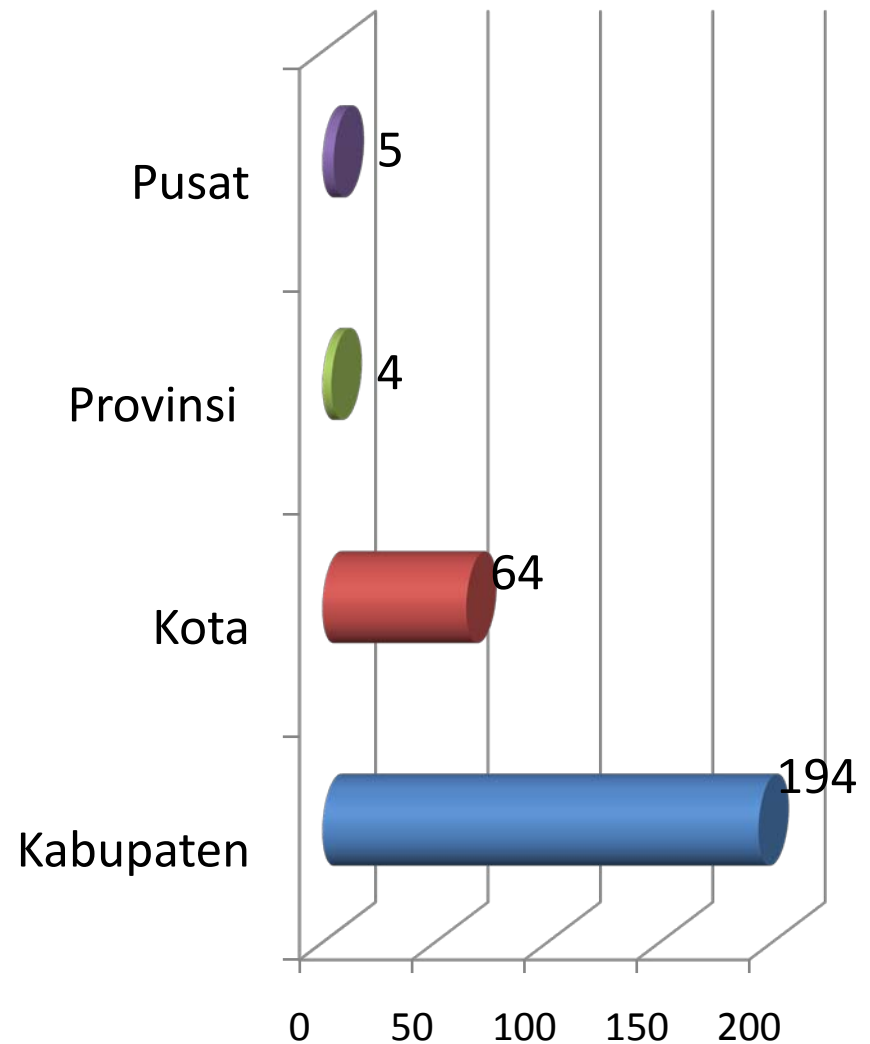
Modus Smt 2 thn
2013



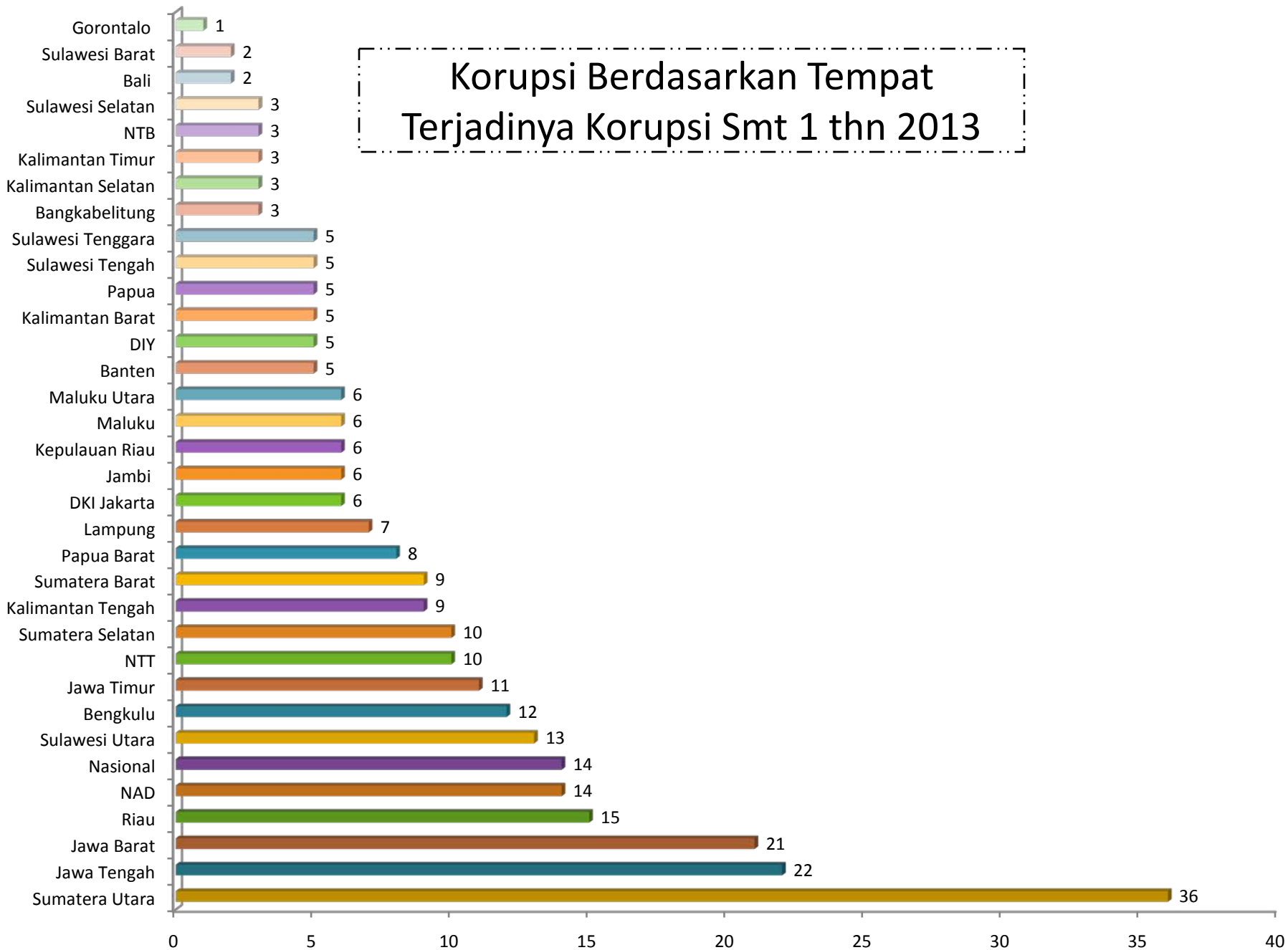
Lokasi Pemberantasan korupsi Smt 2 thn 2013

- Upaya penindakan kasus korupsi di daerah cukup sangat tinggi.
- 98,13% pemberantasan korupsi dilakukan di Kabupaten.
- Fenomena desentralisasi memang benar adanya.

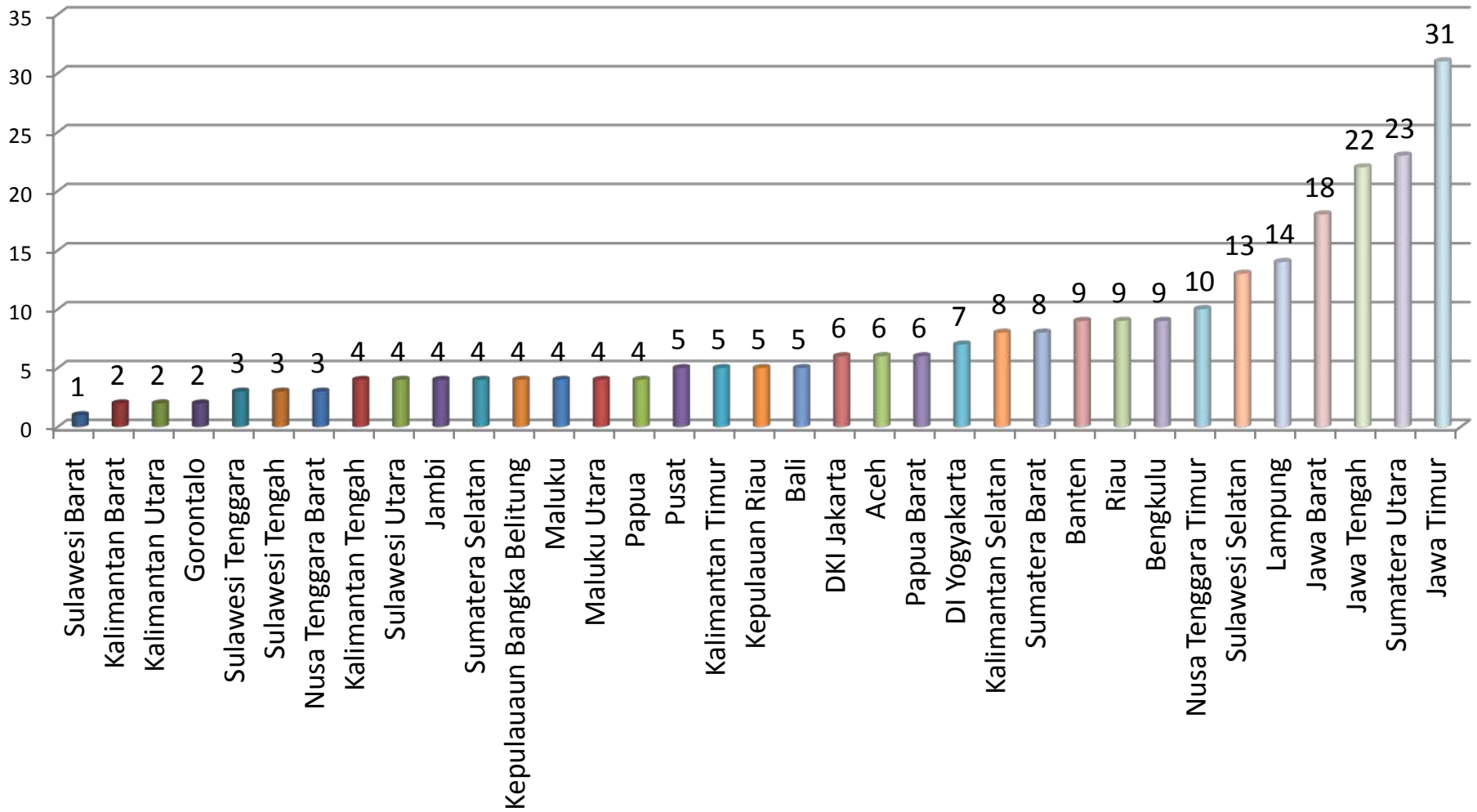
(Dok-ICW2013)



Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya Korupsi Smt 1 thn 2013



Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya Korupsi Smt 2 thn 2013



Korupsi berdasarkan wilayah 2013

- Mengafirmasi terjadinya desentralisasi korupsi dari 267 kasus korupsi, 262 kasusnya terjadi di Daerah (98.12%).
- Terjadi perubahan peringkat penganganan korupsi di daerah. Sumatera utara yang selama ini mendominasi digeser oleh jawa timur.

35 Kepala Daerah jadi tersangka korupsi

No	Nama	Jabatan
1	Hambit Bintih	Bupati Gunung Mas (pemenang pilkada Kabupaten Gunung Mas tahun 2013)
2	Akhmad Fauzan Saleh	mantan kepala Biro Kesra, sekarang Wakil Bupati Banjar
3	Bambang Dwi Hartono	Wakil Wali Kota Surabaya
4	Rina Iriani Sri Ratnaningsih	Bupati Karanganyar
5	Siti Nurmarkesi	Mantan Bupati Kendal
6	Muhamad Tamzil	Mantan Bupati Kudus
7	Dada Rosada	Mantan Walikota Bandung
8	Ratu Atut Choisyah	Gubernur Banten (suap hakim MK)
9	Ratu Atut Choisyah	Gubernur Banten (Kasus Alkes)
10	Drs. Nurdin Abdul Rahman	Mantan Bupati Bireuen
11	Muhammad Hidayat Batubara	Bupati Kabupaten Mandailing Natal
12	Pandopotan Kasmin Simanjutak	Bupati Toba Samosir

No	Nama	Jabatan
13	JR. Saragih	Bupati Simalungun
14	Marwan Ibrahim	Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan
15	Abdul Fattah	Bupati Batanghari nonaktif
16	Muchtar Muis	Mantan Wakil Bupati Kabupaten Muarojambi
17	Mahmud	Mantan Bupati Musi Rawas
18	Wendy Melfa	Mantan Bupati Lampung Selatan
19	Daniel Adoe	Mantan Wali Kota Kupang
20	I Wayan Geredeg	Bupati Karangasem
21	Ahmad Hidayat Mus	Bupati Sula
22	Marcus Wanma	Bupati Kabupaten Raja Ampat
23	Bernard Sagrim	Bupati Maybrat (dana hibah)
24	Bernard Sagrim	Bupati Maybrat (penambahan APBD)
25	YR	Kadis pertanian kota Sorong

Politisi Terjerat Kasus Korupsi

No	Nama Partai	Jumlah			Total
		Pusat	DPRD Prov	DPRD Kab/Kota	
1	Golkar	64	149	146	359
2	Demokrat	20	17	63	100
3	PDI P	32	106	74	212
4	PKS	4	10	27	41
5	PPP	17	40	39	96
6	PKB	9	16	30	55
7	PAN	7	23	28	58
8	Gerindra	1	8	19	28
9	Hanura	-	-	28	28
TOTAL		154	369	454	977

Sumber: Dikutip dari bahan presentasi Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengenai rekap persetujuan tertulis presiden dan menteri dalam negeri untuk penyelidikan/penyidikan pejabat negara/ anggota DPR/DPRD pada tingkat Provinsi/kabupaten/kota.

Dampak Korupsi

- Kewajiban negara dalam rangka menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi warga tidak terpenuhi terutama berkaitan dengan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- Warga terganggu dalam menjalankan kewajiban keagamaan

Pungli di Sekolah

No	Pungutan	No			Pungutan
1	Renang	11	BP3	21	Atletik
2	Pramuka	12	Study tour	22	Daftar ulang
3	Buku tiap semester	13	Sewa buku perpustakaan	23	Baju batik harus baru
4	Uang les	14	LKS	24	Baju olahraga
5	Uang alat-alat kebersihan	15	Biaya peringatan hari besar	25	Uang mutasi
6	Infak (tiap minggu)	16	Beli disket	26	Pembangunan Mushola
7	Uang cat ruangan	17	daftar ulang bangunan	27	B Inggris
8	Uang perpisahan	18	Buku pelajaran	28	Ada biaya daftar
9	Uang pergantian kepala sekolah	19	Pengambilan Rapor	29	Perawatan kompiuter
10	Uang Osis	20	Sumbangan awal tahun	30	Kursus komputer

Rata-Rata Biaya yang dikeluarkan Pasien Miskin Rawat Inap

Komponen Biaya (Rp)	Jenis Pemegang Kartu			
	Jamkesmas	Gakin	SKTM	Jamkesda
Pendaftaran	180.743	161.100	439.667	303.067
Obat	465.707	741.875	1.251.299	236.857
Periksa	609.750	43.333	166.724	105.000
Lainnya	78.361	76.000	694.941	277.389
Transport	69.876	25.380	58.826	82.900
Makan/minum	81.597	49.838	102.447	143.716
Lainnya	50.315	15.000	34.059	174.385
Transport penunggu	53.942	31.707	42.100	90.045

Rata-Rata Biaya yang dikeluarkan Pasien Miskin Rawat Jalan

Komponen Biaya (Rp)	Rawat Jalan			
	Jamkesmas	Gakin	SKTM	Jamkesda
Pendaftaran	47.364	61.143	168.364	44.000
Obat	174.286	2.850.000	388.171	106.667
Periksa	70.000	5.000	645.386	115.000
Lainnnya	28.833	11.444	173.194	9.200
Transport	80.249	15.117	21.992	56.133
Makan/minum	136.944	29.909	82.640	115.000
Lainnya	6.000	100.000	147.667	
Transport penunggu	50.833	17.667	23.622	25.000

Pengelolaan Dana Deposito Haji

Catatan ICW - lanjutan

Berkurangnya nilai deposito pada beberapa BPS yang tidak wajar dan tidak jelas peruntukannya :

1. Pada bank BNI, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp.1,2 triliun (mei 2007) menjadi Rp.481 miliar (juni 2007),
2. Pada bank Mandiri, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp. 1,3 triliun (juni 2007) menjadi Rp.544 miliar (juli 2007),
3. Pada bank BRI, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp.2,2 triliun (mei 2007) menjadi Rp.950 miliar (juni 2007),
4. Pada bank BPD Jabar Banten, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp 67 miliar menjadi Rp.17,28 miliar (juni 2007),
5. Pada bank Nagari, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp.43 miliar (mei 2007) menjadi Rp.26 miliar (juni 2007),
6. Pada bank BPD Jatim, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp.149 miliar (mei 2007) menjadi Rp.75,38 miliar (juni 2007),
7. Pada bank Bukopin, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp.15 miliar (mei 2007) menjadi Rp. 8,38 miliar (juni 2007),
8. Pada bank BPD Aceh, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp 31 miliar (mei 2007) menjadi Rp. 22,76 miliar (juni 2007),
9. pada bank BPD Sumsel, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp.44 miliar (mei 2007) menjadi Rp.18,98 miliar (juni 2007),
10. Pada bank BPD Riau, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp 47 miliar (mei 2007) menjadi Rp. 25,78 miliar (juni 2007),
11. Pada bank DKI, penurunan nominal deposito yang dratis dan tidak wajar dari Rp. 3 miliar (mei 2007) menjadi Rp. 1,88 miliar (juni 2007),

Catatan : Dimana rata-rata penurunan nominal deposito tahun 2007 ini berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama, antara 3 bulan s/d 5 bulan.

Terimakasih